



EUREKA
MEDIA AKSARA



MANAJEMEN KEBIJAKAN LALU LINTAS PERKOTAAN

Ratna Rosmauli Pakpahan, S.I.A., M.Si.

Biografi Penulis



Ratna Rosmauli Pakpahan, S.I.A., M.Si

Ratna merupakan Dosen Tetap di Universitas Victory Sorong, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Publik. Ratna lahir di Sorong tahun 1991. Ketertarikan Ratna terhadap ilmu administrasi negara dimulai pada tahun 2009 silam saat Ratna masuk dan mulai bergabung bersama Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI. Ratna menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Administrasi Negara di FISIP UI tahun 2013 dengan skripsi bidang Kebijakan Publik. Ratna melanjutkan studi Master Administrasi Publik pada tahun 2015 dan menyelesaikan studi Master tahun 2017 di Universitas Pattimura Ambon dengan tesis bidang Kebijakan Publik.

Ratna memiliki keahlian dibidang Administrasi Publik – Kebijakan Publik. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Ratna pun aktif sebagai peneliti dibidang keahliannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI.

Email: ratnarosmauli@gmail.com



EUREKA
MEDIA AKSARA

Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-97936-0-9



9 786239 793609

MANAJEMEN KEBIJAKAN LALU LINTAS PERKOTAAN

Ratna Rosmauli Pakpahan, S.I.A., M.Si.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

MANAJEMEN KEBIJAKAN LALU LINTAS PERKOTAAN

Penulis : Ratna Rosmauli Pakpahan, S.I.A., M.Si.

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Endar Widi Sugiyo

ISBN : 978-623-97936-0-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, AGUSTUS 2021**

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH

NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tata Kelola Pemerintahan	1
B. Ketertiban Lalu Lintas	4
BAB II KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KONSEP PARKIR	9
A. Konsep Kebijakan Publik	9
B. Konsep Implementasi Kebijakan	15
C. Konsep Parkir	24
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON	27
A. Dinas Perhubungan Kota Ambon	27
B. Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan	30
C. Program dan Kegiatan.....	32
D. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas	33
BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR	36
A. Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kota Ambon.....	36
B. Sosialisasi Dinas Perhubungan.....	36
C. Sumber Daya Manusia, Anggaran, Peralatan Dan Kewenangan	48
D. Disposisi.....	66
E. Struktur Birokrasi.....	81
F. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir	88
BAB V PENUTUP.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97
TENTANG PENULIS.....	100

1

PENDAHULUAN

A. Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan nasional dari pembentukan pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan tujuan nasional tersebut dibutuhkan pemerintahan yang kuat dan baik.

Masyarakat membutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentingan publik. Selain itu pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, dimana di masa lalu negara ataupun pemerintah sangat dominan menjadikan masyarakat pihak yang dimarginalkan. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Selain membutuhkan pemerintahan yang baik, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, juga dibutuhkan sebuah peraturan atau kebijakan dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintah untuk mencapai sasaran sebagai pemerintah yang baik. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah juga

2

KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KONSEP PARKIR

A. Konsep Kebijakan Publik

Menurut **Thoha**, (2003:59) dalam arti yang luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain:

1. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Dari dua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

Harold-Lasswell dalam **Miftah** (2003:60) menyebutkan:

"...policy as a projected program of goals, values, and practices"

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa *policy* dapat dirumuskan sebagai suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika.

3

DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON

A. Dinas Perhubungan Kota Ambon

Dinas Perhubungan Kota Ambon sebagai salah satu SKPD dari 48 SKPD yang ada dalam jajaran Pemerintah Kota Ambon yang selalu eksis dan kontinyu melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan yang diemban oleh dinas.

Sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota terkait dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan baik perhubungan darat, perhubungan laut serta perhubungan udara, pos dan telekomunikasi. Pelayanan dasar di bidang perhubungan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi kelancaran arus transportasi orang, barang dan jasa maupun arus komunikasi.

Pembagian tugas atau kewenangan memang sudah ada sejak digulirkan otonomisasi sesuai Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dan lebih spesifik lagi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana dari 125 jenis kewenangan, baru 38 jenis kewenangan di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon yaitu untuk sub bidang perhubungan darat 25 jenis, sub bidang perhubungan laut 8 jenis serta sub bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi 5 jenis. Karena dalam kenyataannya kewenangan tersebut masih ditangani pemerintah seperti

4

FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR

A. Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kota Ambon

Dalam bab IV ini juga akan dibahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kota Ambon. Analisis dilakukan dengan menggunakan data-data yang telah diperoleh dan diolah yang didapatkan melalui wawancara dengan informan maupun informasi tertulis, baik data-data yang dimiliki oleh informan maupun tulisan di media massa.

Analisis ini menggunakan teori **George C. Edward III** yang telah menetapkan empat syarat atau indikator (variable penting) untuk mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposisi*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

B. Sosialisasi Dinas Perhubungan

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh **Edward III** bahwa keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana. Atau dengan kata lain, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu,

5

PENUTUP

Setelah membaca buku ini dapat diketahui mengenai implementasi kebijakan pengelolaan parkir Di Kota Ambon berdasarkan 4 (empat) faktor menurut Edward III sudah dan masih terus berlangsung sampai sekarang, mengingat aktivitas lalu lintas terus berlangsung, sehingga implementasi kebijakan pengelolaan parkir masih terus berlangsung, seiring berjalan waktu tujuan dari implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Ambon belum sepenuhnya terwujud, dikarenakan masih terjadi kemacetan yang mengganggu ketertiban berlalu lintas dan berdampak bagi kenyamanan setiap pengguna jalan. Oleh karena itu perlu peningkatan mutu dan kinerja dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan parkir di Kota Ambon.

Berikut kesimpulan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Ambon berdasarkan 4 (empat) factor Edward III, serta Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Ambon.

Pertama, implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Ambon memiliki 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan, penjelasannya yaitu sebagai berikut: (1) Komunikasi yang merupakan proses penyampaian informasi dalam hal ini yaitu informasi mengenai kebijakan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan Kota Ambon diterukan kepada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Kota Ambon dilanjutkan kepada Pihak Ketiga (pengelola parkir) dan sampai kepada Juru Parkir sudah berjalan namun masih ditemukan kurangnya koordinasi yang baik antara pihak ketiga (pengelola parkir) dengan juru parkir sehingga mengakibatkan sempitnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustinus, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Alfian dan nasarudin syamsudin,. (1990). *Profil budaya politik Indonesia*, Jakarta Pustaka Utama Grafit.
- Bungin, Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: kencana. College Publishing.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakn Publik edisi ke dua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy Fourth Edition*. New jersey: prentice hall.
- _____ (2008). *Understanding Public Policy Eleventh Edition*. New jersey: prentice hall.
- Easton, David. (1953). *The Political System*. New York: knopf.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Martono, Nanang. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nataniel, Elake. (2015). *Kebijakan Publik dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Neuman, W. Laurence. (2007). *Basics of Social Research Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.

- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy – Dinamika Kebijakan; Analisis Kebijakan; Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- _____ (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi M, Oberlin. (1998). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Thoha, Miftah. (2003). *Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahab, solichin. (1990). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (1997). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____ (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____ (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. (2009). *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____ (2012). *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Kota Ambon, *Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan*.

Ambon, *Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Parkir Kendaraan Pada Tepi Ruas Jalan Umum.*

Karya Akademis:

Surami, Sri. 2002. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Semarang.* Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tidak diterbitkan.

Aznom Zaifani, T. 2006. *Strategi Kebijakan Perparkiran Di Kota Pekanbaru.* Tesis. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

Jayanti Lukman, Dwi. 2015. *Implementasi Kebijakan Perparkiran Di Kota Makasar.* Skripsi. Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar, tidak diterbitkan.

TENTANG PENULIS

Ratna Rosmauli Pakpahan, S.I.A., M.Si.



Ratna merupakan Dosen Tetap di Universitas Victory Sorong, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Publik. Ratna lahir di Sorong tahun 1991. Ketertarikan Ratna terhadap ilmu administrasi negara dimulai pada tahun 2009 silam saat Ratna masuk dan mulai bergabung bersama Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI. Ratna menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Administrasi Negara di FISIP UI tahun 2013 dengan skripsi bidang Kebijakan Publik. Ratna melanjutkan studi Master Administrasi Publik pada tahun 2015 dan menyelesaikan studi Master tahun 2017 di Universitas Pattimura Ambon dengan tesis bidang Kebijakan Publik.

Ratna memiliki keahlian dibidang Administrasi Publik - Kebijakan Publik. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Ratna pun aktif sebagai penulis dibidang keahliannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI.

Email: ratnarosmauli@gmail.com